

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENENTU INFLASI DI INDONESIA

Sirtal Sirtalya J Rando¹, Debby Ch. Rotinsulu², Ita Pingkan Fasnje Rorong³
sitalya@gmail.com

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Universitas Sam Ratulangi*

ABSTRAK

Salah satu persoalan yang sering terjadi di negara yang berkembang adalah pertumbuhan dan stabilitas ekonominya. Stabilitas ekonomi dimaksud tersebut menyangkut Stabilitas harga, Stabilitas pendapatan, dan penambahan kesempatan kerja, serta Stabilitas politik. Dalam perekonomian yang cenderung “memanas” (overheating) kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal bersifat kontraktif, sedangkan pada kondisi ekonomi yang “stagnan” kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang efektif adalah kebijakan yang ekspansif. Secara logis, Nilai tukar, pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap inflasi. Sedangkan kenaikan tingkat suku bunga akan menurunkan jumlah uang beredar dan berpengaruh negatif terhadap tingkat inflasi. Jumlah uang beredar berpengaruh negatif terhadap inflasi akan tetapi tidak signifikan secara statistik. Hasil penelitian suku bunga, nilai tukar, pengeluaran pemerintah dan jumlah uang beredar secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap inflasi.

Kata Kunci : Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar, Jumlah Uang beredar dan Pengeluaran Pemerintah

ABSTRACT

One of the problems that often occurs in developing countries like Indonesia is maintaining stability and economic growth. This economic stability concerns the stability of the price level, the level of national income, and the growth of employment opportunities. The government can implement a series of policies in an effort to stabilize the economy. For example, monetary policy and fiscal policy, which aims to achieve a stable price level or inflation rate. The purpose of this study was to see the effect of interest rates, exchange rates, government spending and the amount of money in circulation on inflation. The research method used is multiple regression with the analysis tool Eviews 8. The results showed that the SBI interest rate had a positive and significant effect on inflation in Indonesia. The exchange rate has a positive influence on inflation. That is, if the exchange rate rises, inflation will increase ceteris paribus. Government Expenditures has a positive relationship to inflation but is not statistically significant. The money supply has a negative effect on inflation but is not statistically significant. The results of the research on interest rates, exchange rates, government spending and the money supply together have a significant effect on inflation.

Keywords: Inflation, Interest Rates, Exchange Rates, Money Supply and Government Expenditures

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Inflasi secara sederhana diartikan sebagai kenaikan harga secara umum, terus menerus dan dalam jangka panjang. Kenaikan harga secara umum bagi suatu negara merupakan hal yang wajar terjadi, selama tidak melebihi batas normal, berlangsung singkat, dan masih bisa dikendalikan oleh pemerintah. Inflasi dianggap berbahaya jika sudah melebihi dua digit dan berlangsung dalam jangka panjang. Selain itu inflasi yang tinggi dapat menyebabkan dampak negatif, seperti menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang dialami semua negara didunia. Inflasi adalah gejala kenaikan tingkat harga umum secara terus menerus. Suatu Negara yang sedang membangun, pemerintahannya melalui otoritas moneter akan selalu berusaha mengendalikan inflasi pada tingkat ideal. secara umum inflasi dapat dikendalikan melalui kebijakan moneter atau dengan kebijakan fiskal. Inflasi menurut tingkatannya dapat dikategorikan Inflasi ringan (0% - 10%), Inflasi Sedang jika pada kisaran (10% - 30%) /tahun, kemudian Inflasi berat (30% - 100%) /tahun dan hiperinflasi (> 100%) /tahun. Pada angka inflasi kurang dari 10 persen per tahun (1 digit), maka akan menjadi insentif bagi investor, namun jika pada angka 2 digit, maka otoritas moneter dan fiskal akan melakukan kebijakan yang kontraktif untuk mengendalikan gejala kenaikan tingkat harga umum.

Puncak inflasi Indonesia terjadi pada tahun 1962-1965 yaitu berada diatas 100% (year-on-year), salah satu penyebabnya adalah pemerintah dengan mudahnya mencetak uang untuk membayar hutang dan mendanai proyek-proyek besar seperti pembangunan Monas (sumber <https://id.wikipedia.org>). Pemerintah Indonesia mencetak uang dalam jumlah banyak mungkin dengan tujuan untuk menambah kas negara. Ditengah situasi ekonomi dan politik yang amat buruk, pada tanggal 13 Desember 1965 pemerintah akhirnya menerapkan kebijakan redominasi atau penyederhanaan nilai mata uang tanpa mengurangi nilai tukar diterbitkan pecahan uang baru Rp.1 yang memiliki daya beli setara dengan Rp.1.000. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait kebijakan redominasi, apalagi di negara kepulauan yang luas seperti di Indonesia menambah kebingungan di masyarakat yang tentunya memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda.

Kebijakan pemerintah ini tidak berhasil meredam inflasi, sebaliknya harga-harga tetap naik tinggi yang mengakibatkan terjadinya hiperinflasi. Hiperinflasi adalah inflasi yang tidak terkendali, dimana terjadi lonjakan harga secara cepat dan tiba-tiba, tanpa adanya kenaikan pendapatan secara umum, sehingga jumlah uang yang beredar terlalu banyak, namun nilai mata uang turun secara drastic. Ciri khas inflasi diantaranya adalah hilangnya kepercayaan rakyat terhadap uang, dimana begitu mereka mendapatkan uang akan serta merta dibelanjakan karena adanya kekhawatiran nilai uang akan terus menerus merosot. Faktanya bahwa pada tahun 1960-an ekonomi Indonesia hancur karena inflasi dan hutang sementara ekspor menurun. Sepanjang dekade 1960-an, inflasi rata-rata sebesar 196,08% dengan tingkat paling parah terjadi pada tahun 1966 (635,35%). Hanya pada tahun 1969 saja inflasi berada pada level rendah (9,89%). Sejak saat itu pemerintah berusaha untuk mengendalikan laju inflasi di Indonesia melalui kebijakan-kebijakannya, diantaranya strategi pembanguan jangka panjang dan terarah. Hasilnya pada

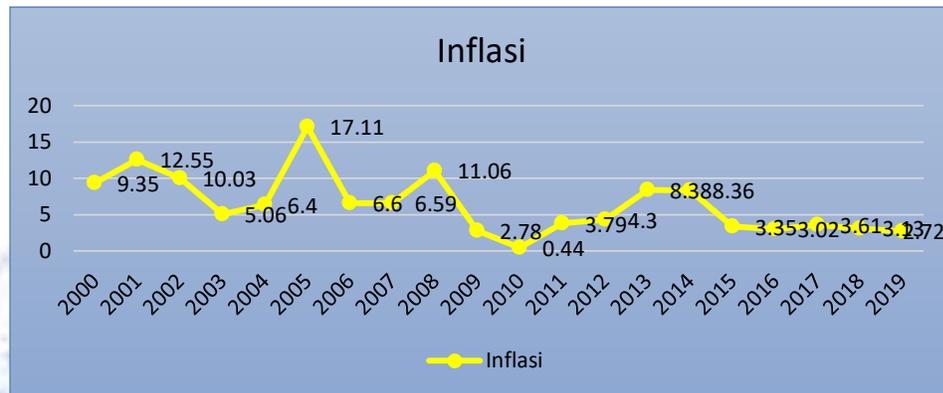
tahun 1969-1971, inflasi di Indonesia berada dibawah level 10%. Pada rentang waktu tahun 1972 sampai dengan tahun 1980-an laju inflasi rata-rata berada pada level dua digit. Kemudian pada tahun 1984-1996 laju inflasi dapat dikendalikan pada level satu digit.

Pada tahun 1997, krisis moneter yang terjadi di Thailand menyebar ke negara-negara di Asia termasuk di Indonesia. Berawal dari krisis nilai tukar Baht Thailand pada bulan Juli 1997, pada tahun 1998 dengan cepat berkembang menjadi krisis ekonomi di Asia Tenggara. Pada Juni 1997, banyak yang berpendapat bahwa Indonesia masih jauh dari krisis karena disaat itu inflasi yang rendah, surplus neraca perdagangan lebih dari US\$900 juta, cadangan devisa cukup besar lebih dari US\$20 Miliar. Sebelum tahun 1997 tercatat rupiah menguat terhadap dollar sehingga banyak perusahaan di Indonesia yang meminjam dalam bentuk dollar. Terpuruknya kepercayaan terhadap pemerintah yang berkuasa, jatuh tempo hutang luar negeri membuat Rupiah yang ditutup pada level Rp4.850/dollar AS pada 1997. Hanya dalam kurun waktu satu tahun nilai rupiah mengalami depresiasi mencapai 600%. Pada bulan Juli 1998, 1 dolar AS dihargai Rp16.650. Meski begitu, tanggal 31 Desember 1998 nilai rupiah mulai menguat ke angka Rp8.000 per dolar. Efek krisis moneter makin terasa beriringan dengan turunnya kepercayaan pasar dan masyarakat akibat kebijakan pemerintah yang tidak jelas untuk menangani krismon yang terjadi. Kerusakan dan protes kepada pemerintah yang terjadi meluas diseluruh Indonesia saat berakhirnya Orde Baru memicu inflasi sebesar 77,63% pada 1998. Terjadi lonjakan harga-harga barang diikuti dengan melemahnya nilai tukar Rupiah pada saat itu.

Inflasi tinggi di Indonesia juga tercatat terjadi pada tahun 2005, yaitu mencapai 17,1% yang merupakan dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak. Kenaikan harga BBM dapat menyebabkan kenaikan biaya produksi dan biaya distribusi sehingga inflasi pun secara beriringan akan meningkat. Biaya produksi dan transportasi yang meningkat, mengharuskan pelaku usaha untuk menaikkan harga hasil produksi ataupun jasa.

Tahun 2008 Rupiah mengalami pelemahan yang sangat tajam yaitu pada Januari pada Rp.9.800 menjadi Rp.11.000 di akhir 2008. Menurut Deputy Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo, hal ini terjadi karena krisis global yang ikut dirasakan Indonesia. Berdasarkan Laporan Perekonomian Indonesia tahun 2008 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, krisis global berawal di Amerika Serikat pada tahun 2007 dan berdampak pada negara-negara berkembang. Terdepresiasinya nilai Rupiah menjadikan harga faktor produksi dan bahan baku impor meningkat, hal ini mengakibatkan terjadinya kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya tersebut akan berujung dengan kenaikan inflasi (cost push inflation). Berikut adalah perkembangan inflasi di Indonesia dalam 20 (duapuluh) tahun terakhir yaitu periode tahun 2000 sampai 2019 :

Gambar 1
Inflasi Tahun 2000 – 2019



Sumber : Bank Indonesia (SEKI)

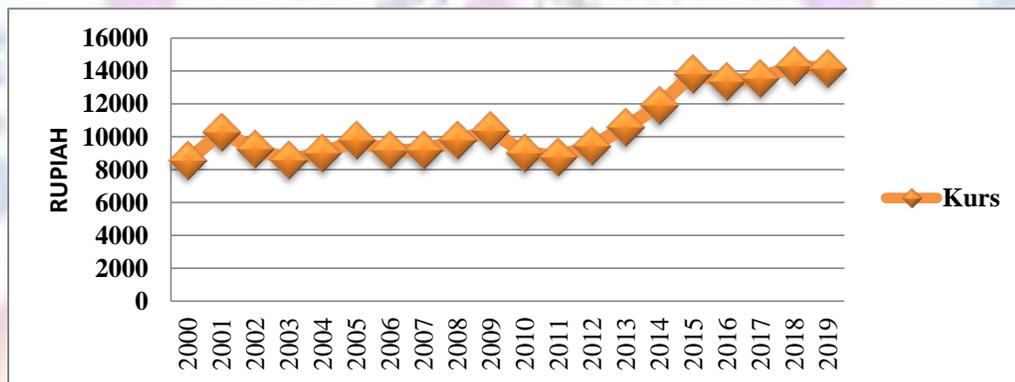
Perkembangan tingkat inflasi di Indonesia dari tahun 2000 sampai 2019 pada gambar diatas menunjukkan kenaikan dan penurunan tingkat inflasi atau sering disebut fluktuasi. Tahun 2000 inflasi sebesar 9.35 persen naik pada tahun 2001 menjadi 12.55 persen. Tahun 2003 mengalami penurunan inflasi menjadi 5.06 persen kemudian pada tahun 2005 mengalami kenaikan inflasi menjadi 17.11 persen, tahun 2006 turun menjadi 6.6 persen. Pada tahun 2008 11.06 persen tahun 2010 inflasi turun menjadi 0.44 persen. Tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 8.38 persen dan pada tahun 2019 inflasi sebesar 2.72 persen.

Inflasi tidak hanya menjadi perhatian bagi bank sentral, pemerintah maupun dunia usaha, tetapi juga bagi masyarakat umum karena inflasi langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup. Bahkan bagi sebagian masyarakat kenaikan harga barang dan jasa kebutuhan pokok menjadi beban hidup yang berat. Bagi dunia usaha laju inflasi dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil menyulitkan suatu perencanaan, karena kecenderungan bagi dunia usaha tidak termotivasi untuk melakukan tabungan dan investasi. Sedangkan bagi pemerintah tingkat inflasi menjadi perhatian pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang muara akhirnya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mengingat pengaruh inflasi terhadap yang luas pada masyarakat, maka setiap negara senantiasa berupaya untuk mengendalikan laju inflasi agar tetap rendah dan stabil. Inflasi memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan hidup masyarakat, sehingga pemerintah harus mampu mengendalikan inflasi dan variable-variabel yang mempengaruhinya. Di Indonesia, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral diberikan mandat melalui undang-undang untuk mengendalikan laju inflasi. Dalam upaya pengendalian inflasi, tentu saja Bank Sentral perlu bersinergi dengan pemerintah pusat maupun daerah. Inflasi yang rendah dan stabil mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang ujungnya akan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sedangkan inflasi yang tinggi dan tidak stabil dapat memberikan dampak negative terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sebagaimana sejarah inflasi di Indonesia yang memperlihatkan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak terkendali menyulitkan masyarakat maupun pelaku usaha dalam menentukan konsumsi, investasi dan produksi.

Menurut Keynes (Boediono, 1994), inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonominya. Dengan demikian permintaan masyarakat akan barang melebihi jumlah yang tersedia. Hal ini terjadi karena masyarakat mengetahui keinginannya dan menjadikan keinginan tersebut dalam bentuk permintaan yang efektif terhadap barang. Dengan kata lain, masyarakat berhasil memperoleh dana tambahan diluar batas kemampuan ekonominya sehingga golongan masyarakat ini bisa memperoleh barang dengan jumlah yang lebih besar dari pada yang seharusnya. Tentunya tidak semua golongan ini seperti masyarakat yang berpenghasilan tetap atau penghasilannya meningkat tidak secepat laju inflasi. Bila jumlah permintaan barang meningkat, pada tingkat harga berlaku, melebihi jumlah maksimum dari barang-barang yang bisa dihasilkan oleh masyarakat, maka *inflationary gap* akan timbul. Nilai tukar mata uang memegang peranan penting bagi suatu negara, dengan menjaga posisi nilai tukar mata uang berada dalam keadaan yang relatif stabil. Jika harga mata uang dalam negeri naik akan menyebabkan kenaikan pada harga barang dan jasa karena Indonesia merupakan negara yang selalu mengimpor barang dan jasa dari luar negeri, sehingga ketika harga mata uang Indonesia turun atau terdepresiasi akan menyebabkan kenaikan inflasi.

Gambar 2
Nilai Tukar (Periode 2000-2019)

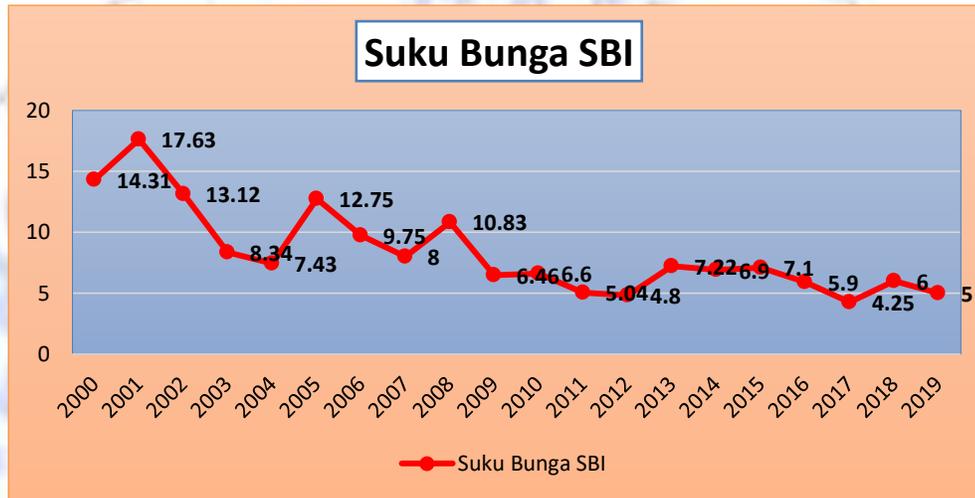


Sumber: Bank Indonesia, SEKI

Berdasarkan grafik 2 perkembangan nilai tukar atau kurs dari tahun 2000-2019 mengalami kenaikan dan penurunan atau disebut fluktuasi. Tahun 2000 kurs berada pada Rp.8.534/US\$ mengalami kenaikan kurs pada tahun 2001 menjadi Rp. 10.266 US\$ mengalami penurunan sampai tahun 2003 sebesar Rp. 8.571 US\$ dan mengalami kenaikan nilai tukar pada tahun 2005 Rp. 9751 US\$. Pada tahun 2015 nilai tukar mengalami kenaikan menjadi Rp. 13.795 US\$ pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp. 13.330 US\$ mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar Rp. 14267 US\$ dan pada tahun 2019 nilai tukar mengalami penurunan menjadi Rp. 14131 US\$. Otoritas moneter dalam hal ini bank sentral Indonesia yaitu Bank Indonesia dengan kebijakannya melalui suku bunga yang merupakan salah satu instrumen yang dapat mengendalikan tingkat inflasi. Suku bunga yang tinggi akan mendorong investor untuk menanamkan dananya di bank daripada menginvestasikannya pada sektor produksi atau industri yang memiliki tingkat risiko lebih

besar. Sehingga dengan demikian, tingkat inflasi dapat dikendalikan melalui kebijakan tingkat suku bunga (Khalwaty, 2000:144).

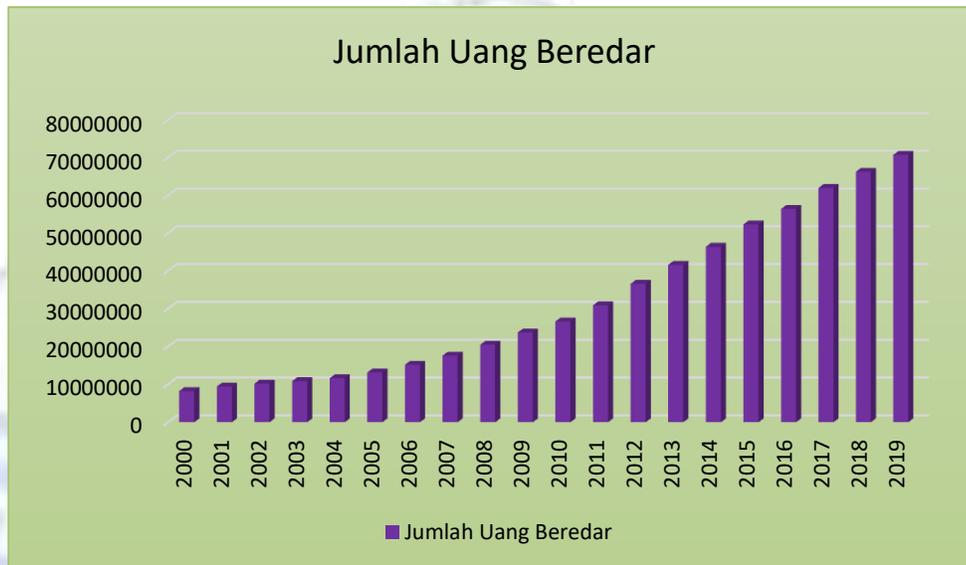
Gambar 3
Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia
(Periode 2000-2019)



Sumber : Bank Indonesia (SEKI)

Perkembangan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia terlihat pada grafik diatas terjadi kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Pada Tahun 2000 suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia sebesar 14.31 persen mengalami kenaikan pada tahun 2001 sebesar 17.63 persen kemudian mengalami penurunan sampai 7.43 persen pada tahun 2004. Pada tahun 2005 naik menjadi 12.75 persen mengalami penurunan suku bunga pada tahun 2007 sebesar 8.00 persen. Pada tahun 2008 naik sebesar 10.83 persen terus mengalami penurunan tahun 2012 menjadi 4.80 persen. Tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 7.22 persen akan tetapi turun pada tahun 2014 menjadi 6.9 persen tahun 2015 naik menjadi 7.10 persen tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 4.25 persen. Tahun 2018 suku bunga sertifikat bank Indonesia naik menjadi 6.00 persen akan tetapi tahun 2019 turun menjadi 5.00 persen. Dalam upaya mengendalikan inflasi kebijakan moneter yang dilakukan oleh otoritas Bank Indonesia yang bersifat *contractionary* yaitu dengan mengurangi jumlah uang beredar atau penawaran uang (*supply of maney*) salah satunya menaikkan suku bunga atau memperbesar cadangan devisa. Dimana kebijakan ini akan menimbulkan penurunan investasi dan menurunkan konsumsi dalam perekonomian masyarakat (Murni, 2016:223). Disaat inflasi akan terjadi penurunan nilai uang, sedangkan turunnya nilai uang disebabkan oleh perubahan jumlah uang beredar, kecepatan peredaran uang dan jumlah barang yang diperdagangkan sehingga untuk mengatasi laju inflasi prinsipnya adalah dengan menaikkan nilai uang. Salah satunya melalui kebijakan uang ketat yang artinya menyempitkan pemberian kredit sehingga dapat menurunkan jumlah uang beredar. Berikut ini adalah perkembangan jumlah uang beredar di Indonesia

Gambar 4
Jumlah Uang Beredar
2000-2019



Sumber: Bank Indonesia, SEKI

Perkembangan jumlah uang beredar setiap tahunnya terus mengalami kenaikan. Tahun 2000 jumlah uang beredar sebesar 8,230,571 miliar rupiah mengalami peningkatan jumlah uang beredar pada tahun 2001 sebesar 9,440,962 miliar rupiah. Terus mengalami kenaikan jumlah uang beredar sampai tahun 2011 sebesar 30,854,553 miliar rupiah. Pada tahun 2017 jumlah uang beredar sebesar 61,959,543 miliar rupiah tahun 2018 jumlah uang beredar meningkat menjadi 66,220,040 miliar rupiah dan pada tahun 2019 jumlah uang beredar meningkat menjadi 70,696,568 miliar rupiah. Selain kebijakan moneter, kebijakan fiskal juga merupakan upaya dalam pengendalian laju inflasi dan salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam mengendalikan inflasi ialah dengan mengurangi pengeluaran pemerintah sehingga permintaan barang atau jasa bisa ditekan dan hasilnya harga barang atau jasa juga akan turun atau menaikkan pajak dimana kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan menurunkan *Aggregate Demand* sehingga pembelian terhadap barang konsumsi dan investasi turun.

Gambar 5
Pengeluaran Pemerintah
2000-2019



Sumber: Bank Indonesia, SEKI

Perkembangan pengeluaran pemerintah dapat dilihat pada gambar diatas setiap tahunnya mengalami peningkatan pengeluaran pemerintah. Tahun 2000 pengeluaran pemerintah sebesar 223,907 miliar rupiah tahun 2008 naik menjadi 989,494 miliar rupiah dan pada tahun 2009 pengeluaran pemerintah naik menjadi 1,000,844. Terus mengalami peningkatan pada tahun 2010 naik menjadi 1,126,146 miliar rupiah, tahun 2011 meningkat menjadi 1,320,751 miliar rupiah. Tahun 2012 meningkat menjadi 1,548,310 miliar rupiah, tahun 2013 sebesar 1,726,191 miliar rupiah. Tahun 2014 pengeluaran pemerintah meningkat menjadi 1,876,873 miliar rupiah. Pada tahun 2016 meningkat menjadi 2,082,949 miliar rupiah, tahun 2017 meningkat menjadi 2,133,296 miliar rupiah dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 2,220,657 miliar rupiah tahun 2019 pengeluaran pemerintah meningkat menjadi 2,461,112 miliar rupiah.

Meskipun inflasi banyak berdampak buruk bagi perekonomian suatu negara, akan tetapi dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan baik moneter maupun fiskal bukan untuk menghilangkan inflasi. Karena jika inflasi nol persen juga tidak akan memacu pertumbuhan ekonomi tetapi hanya akan menimbulkan stagnasi. Sehingga kebijakan yang dilakukan adalah upaya untuk mengendalikan laju inflasi. Inflasi yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi adalah inflasi yang relative tetap dan bila ada perubahan akan dapat diprediksi (Murni, 2016: 223).

Menjaga kestabilan nilai tukar, mengatur tingkat suku Bunga dan jumlah uang beredar bahkan pengeluaran pemerintah adalah upaya-upaya dalam mensatbilak laju inflasi untuk berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas penulis ingin meneliti lebih lanjut penelitian yang berjudul “Analisis factor-faktor penentu inflasi di Indonesia”.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Suku Bunga Mata Uang berpengaruh terhadap Inflasi di Indonesia?

2. Apakah Nilai Tukar berpengaruh terhadap Inflasi di Indonesia?
3. Apakah Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap Inflasi di Indonesia?
4. Apakah jumlah uang beredar berpengaruh terhadap Inflasi di Indonesia?
5. Apakah nilai tukar, suku bunga, pengeluaran pemerintah dan jumlah uang beredar secara bersama-sama berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan diatas tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Suku Bunga Mata Uang terhadap Inflasi di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh Nilai Tukar terhadap Inflasi di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Inflasi di Indonesia.
4. Untuk menganalisis pengaruh jumlah uang beredar terhadap Inflasi di Indonesia.
5. Untuk menganalisis pengaruh nilai tukar, suku bunga, pengeluaran pemerintah dan jumlah uang beredar secara bersama-sama terhadap inflasi di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Kajian Teori

Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus Sukirno (2002). Akan tetapi bila kenaikan harga hanya dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau menyebabkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain (Boediono, 2000). Kenaikan harga-harga barang itu tidaklah harus dengan persentase yang sama.

Inflasi merupakan kenaikan harga secara terus-menerus dan kenaikan harga yang terjadi pada seluruh kelompok barang dan jasa (Pohan, 2008). Bahkan mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut secara bersamaan secara terus-menerus selama suatu periode tertentu. Kenaikan harga barang yang terjadi hanya sekali saja, meskipun dalam persentase yang cukup besar dan terus-menerus, bukanlah merupakan inflasi (Nopirin, 2000). Kenaikan sejumlah bentuk barang yang hanya sementara dan sporadis tidak dapat dikatakan akan menyebabkan inflasi.

Pengertian Suku Bunga

Menurut Hubbard (1997), suku bunga adalah biaya yang harus dibayar *borrower* atas pinjaman yang diterima dan imbalan bagi *lender* atas investasinya. Sementara itu, Kern dan Guttman (1992) menganggap suku bunga merupakan sebuah harga dan sebagaimana harga lainnya, maka tingkat suku bunga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran.

Menurut Karl dan Fair (2001), suku bunga adalah pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman, dalam bentuk persentase dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman. Pengertian suku bunga menurut Sunariyah (2004) adalah harga dari pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur. Menurut Lipsey, Ragan, dan Courant (1997) suku bunga adalah harga yang dibayarkan untuk satuan mata uang yang dipinjam pada periode waktu tertentu. Menurut

Nopirin (1992) fungsi tingkat bunga dalam perekonomian yaitu alokasi faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dipakai sekarang dan di kemudian hari.

Tingkat Kurs

Nilai tukar Rupiah atau disebut juga kurs Rupiah adalah perbandingan nilai atau harga mata uang Rupiah dengan mata uang lain. Perdagangan antar negara di mana masing-masing negara mempunyai alat tukarnya sendiri mengharuskan adanya angka perbandingan nilai suatu mata uang dengan mata uang lainnya, yang disebut kurs valuta asing atau kurs (Salvatore, 1997).

Sedangkan menurut Adiningsih, dkk (1998), nilai tukar rupiah adalah harga rupiah terhadap mata uang negara lain. Jadi, nilai tukar rupiah merupakan nilai dari satu mata rupiah yang ditranslasikan ke dalam mata uang negara lain. Misalnya nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS, nilai tukar rupiah terhadap Yen, dan lain sebagainya. Kurs inilah sebagai salah satu indikator yang mempengaruhi aktivitas di pasar saham maupun pasar uang karena investor cenderung akan berhati-hati untuk melakukan investasi.

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan alokasi anggaran yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya ke berbagai sektor atau bidang dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui bermacam – macam program. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan ke dalam dua golongan sebagai berikut :

1. Pengeluaran Rutin

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang secara rutin setiap tahunnya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan roda pemerintahan, yang terdiri dari belanja pegawai yaitu untuk pembayaran gaji pegawai termasuk gaji pokok dan tunjangan, belanja barang, yaitu untuk pembelian barang - barang yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah sehari – hari, subsidi, pembayaran angsuran dan bunga utang negara, belanja pemeliharaan yaitu pengeluaran untuk memelihara agar milik atau kekayaan pemerintah tetap terpelihara secara baik dan belanja perjalanan yaitu untuk perjalanan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan.

2. Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan fisik dan non fisik dalam rangka menambah modal masyarakat. Contoh pembangunan fisik adalah pembangunan jalan, jembatan, sekolah dan ruman sakit. Sedangkan pembangunan non fisik seperti pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.

Pengeluaran yang dilakukan pemerintah menunjukkan perannya dalam perekonomian Dalam rangka mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera. Menurut Dumairy (1999 : 56) Pemerintah memiliki 4 peran yaitu :

- Peran alokasi, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi.
- Peran distributif, yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil – hasil ekonomi secara adil dan wajar.
- Peran stabilitatif, yakni peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan equilibrium.
- Peran Dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.

Jumlah Uang Beredar

Penawaran uang sering juga disebut jumlah uang beredar. Penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar baik yang ada di tangan masyarakat maupun di lembaga keuangan. Definisi dari pengertian uang beredar terdiri atas beberapa bagian, diantaranya:

1. Uang Inti (Base Money)

Uang inti adalah uang yang dicetak oleh otoritas moneter atau Bank Sentral. Uang ini terdiri dari uang kartal (C) ditambah reserve (R). Dapat dituliskan menjadi sebuah persamaan sebagai berikut.

$$M_0 = C + R$$

Dimana:

M_0 : Base Money
C : Uang Kartal
R : Reserve

2. Jumlah uang beredar (JUB) dalam arti sempit (M_1) atau *narrow money*

Jumlah uang beredar dalam arti sempit adalah kewajiban sistem moneter kepada swasta domestik, terdiri atas uang kartal dan uang giral. Secara umum, uang kartal adalah uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh otoritas moneter berdasarkan Undang-Undang, sedangkan uang giral adalah simpanan atau saldo rekening pada bank-bank pencipta uang giral yang setiap saat dapat ditarik oleh pemiliknya tanpa dikenakan denda. Uang giral terdiri atas rekening koran dalam bentuk rupiah milik penduduk Indonesia, pengiriman uang serta deposito berjangka dan tabungan yang telah jatuh tempo.

Jumlah uang beredar (JUB) dalam arti sempit (*narrow money*) dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut.

$$M_1 = M_0 + DD$$

Dimana:

M_1 : *Narrow Money*
 M_0 : Base Money
DD : Demand Deposit

3. Jumlah uang beredar dalam arti luas (M2) atau broad money

Diartikan dengan likuiditas perekonomian adalah kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta domestik yang terdiri atas uang giral (M1) ditambah dengan uang kuasi. Uang kuasi merupakan aktiva milik sektor swasta domestik yang dapat memenuhi sebagai fungsi uang. Ini berarti uang kuasi merupakan uang yang likuid. Uang kuasi sebenarnya berfungsi sebagai aset atau kekayaan moneter masyarakat yang disimpan dalam bentuk tabungan finansial yang besarnya ditentukan oleh tingkat pengembaliannya (suku bunga deposito) dan tingkat pendapatan masyarakat. Jumlah uang beredar dalam arti luas atau broad money dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut.

$$M2 = M1 + QM$$

Dimana:

M2 : Broad Money

QM : Quasy Money

M1 : Narrow Money

4. Jumlah uang beredar arti paling luas (M3)

Selain M1 dan M2, ada juga pengertian jumlah uang beredar dalam arti paling luas yang terdiri dari M2 ditambah deposit berjangka (time deposit) pada lembaga-lembaga keuangan bukan bank (multifinance, asuransi, pegadaian, dll). Jumlah uang beredar dalam arti paling luas dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut.

$$M3 = M2 + TDLKBB$$

Dimana :

M3 : Jumlah Uang Beredar Dalam Arti Paling Luas

M2 : Broad Money

TDLKBB : Time Deposit Pada Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Jumlah uang beredar merupakan salah satu variabel sektor moneter yang dianggap penting. Dalam suatu penelitian JUB dinyatakan sebagai indikator yang memberikan sinyal positif terhadap adanya pertumbuhan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah atau prosedur yang akan dilakukan dalam pengumpulan data atau informasi empiris guna memecahkan permasalahan dan menguji hipotesis penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Data dan Sumber Data

Penelitian ini dibatasi dengan menganalisis data sekunder deskriptif kuantitatif. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Indriantoro, 1999). Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai

dengan data yang sebenarnya. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Sumber data berasal dari berbagai sumber antara lain, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik Nasional, jurnal-jurnal ilmiah dan literature-literatur lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Selain itu, penulis juga melakukan studi literature untuk mendapatkan teori yang mendukung penelitian. Referensi studi kepustakaan diperoleh melalui jurnal-jurnal penelitian terdahulu.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini adalah di Indonesia dengan pengambilan data melalui Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik Nasional untuk pengambilan data penelitian. Waktu penelitian adalah kuartalan dari 2000-2019

Metode Analisis Regresi Berganda

Untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen dan independen, maka pengolahan data dilakukan dengan metode analisis regresi berganda. Dalam analisis ini dilakukan dengan bantuan program *Eviews 8.0*. adapun rumusnya sebagai berikut:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, X_4)$$

Kemudian dibentuk dalam model ekonometrika dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Dimana:

- Y = Inflasi
- X₁ = Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
- X₂ = Nilai Tukar
- X₃ = Pengeluaran Pemerintah
- X₄ = Jumlah Uang Beredar
- α = Konstanta/ Intercept
- β = Koefisien Regresi
- e = Standar Error

Untuk mengetahui tingkat signifikan dari masing-masing koefisien regresi variabel independen (variabel bebas) terhadap variabel dependen (variabel terikat) maka dilakukan uji statistik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Estimasi

Berikut hasil regresi untuk mengetahui Pengaruh Suku Bunga SBI, Nilai Tukar,

Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Uang Beredar terhadap Inflasi di Indonesia. Data diestimasi dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*) analisis regresi berganda sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, dan diolah menggunakan program *Eviews 08*.

Estimasi Regresi Berganda

Berikut ini merupakan hasil olah data dengan menggunakan *Eviews* untuk mengetahui pengaruh antara variabel Inflasi (Y) (variabel dependen) dengan Suku Bunga SBI (X₁), Nilai Tukar (X₂), Pengeluaran Pemerintah (X₃), dan Jumlah Uang Beredar (X₄) (variabel independen) di Indonesia:

$$Y = -6.659472 + 1.022414X_1 + 2.544508X_2 + 17.46654X_3 - 16.70118X_4$$

Table 1
Persamaan Suku Bunga SBI (X₁), Nilai Tukar (X₂), Pengeluaran Pemerintah (X₃), dan Jumlah Uang Beredar (X₄) terhadap Inflasi (Y)

| Dependent Variable: Y | | | | |
|---------------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------|
| Method: Least Squares | | | | |
| Sample: 2000 2019 | | | | |
| Included observations: 20 | | | | |
| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
| X1 | 1.022414 | 0.355146 | 2.878856 | 0.0115 |
| X2 | 2.544508 | 19.50702 | 0.130441 | 0.8980 |
| X3 | 17.46654 | 11.79221 | 1.481193 | 0.1593 |
| X4 | -16.70118 | 15.93440 | -1.048121 | 0.3112 |
| C | 6.659472 | 35.06800 | 0.189902 | 0.8519 |
| R-squared | 0.688108 | Mean dependent var | | 6.431500 |
| Adjusted R-squared | 0.604937 | S.D. dependent var | | 4.093190 |
| S.E. of regression | 2.572735 | Akaike info criterion | | 4.940134 |
| Sum squared resid | 99.28448 | Schwarz criterion | | 5.189067 |
| Log likelihood | -44.40134 | Hannan-Quinn criter. | | 4.988728 |
| F-statistic | 8.273400 | Durbin-Watson stat | | 1.842746 |
| Prob(F-statistic) | 0.000988 | | | |

Sumber : Hasil Olah Data *Eviews*

1. Uji Parsial (Uji t)

Hasil persamaan regresi suku bunga (X₁) pada tabel 1 dapat diketahui bahwa variabel suku bunga (X₁) dengan nilai koefisien sebesar 1.022414 yang memiliki tanda positif artinya bahwa suku bunga berpengaruh positif terhadap inflasi dan signifikan secara statistik dengan nilai sig lebih kecil dari α 5% atau dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Suku bunga (X₁) mempunyai nilai t_{hitung} yakni 2.878856 dan t_{tabel} 1.724. Jadi, t_{hitung} 2.878856 > t_{tabel} 1.724 Artinya ada hubungan linier antara suku bunga (X₁) dengan inflasi (Y). Jadi, dapat disimpulkan suku bunga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi .

Hasil persamaan regresi nilai tukar (X_2) pada tabel 4.1 dapat diketahui bahwa variabel nilai tukar (X_2) dengan nilai koefisien sebesar 2.544508 yang memiliki tanda positif artinya bahwa nilai tukar berpengaruh positif terhadap inflasi akan tetapi tidak signifikan secara statistik dengan nilai sig lebih besar dari α 5% atau tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Nilai tukar (X_2) mempunyai nilai t_{hitung} yakni 0.130441 dan t_{tabel} 1.724. Jadi, t_{hitung} 0.130441 < t_{tabel} 1.724 Artinya tidak ada hubungan linier antara nilai tukar (X_2) dengan inflasi (Y). Jadi, dapat disimpulkan nilai tukar memiliki pengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap inflasi .

Hasil persamaan regresi pengeluaran pemerintah (X_3) pada tabel 4.1 dapat diketahui bahwa variabel pengeluaran pemerintah (X_3) dengan nilai koefisien sebesar 17.46654 yang memiliki tanda positif artinya bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap inflasi akan tetapi tidak signifikan secara statistik dengan nilai sig lebih besar dari α 5% atau tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Pengeluaran pemerintah (X_3) mempunyai nilai t_{hitung} yakni 1.481193 dan t_{tabel} 1.724. Jadi, t_{hitung} 1.481193 < t_{tabel} 1.724 Artinya tidak ada hubungan linier antara pengeluaran pemerintah (X_3) dengan inflasi (Y). Jadi, dapat disimpulkan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap inflasi .

Hasil persamaan regresi jumlah uang beredar (X_4) pada tabel 4.1 dapat diketahui bahwa variabel jumlah uang beredar (X_4) dengan nilai koefisien sebesar -16.70118 yang memiliki tanda negatif artinya bahwa jumlah uang beredar (X_4) berpengaruh negatif terhadap inflasi akan tetapi tidak signifikan secara statistik dengan nilai sig lebih besar dari α 5% atau tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. jumlah uang beredar (X_4) mempunyai nilai t_{hitung} yakni 1.048121 dan t_{tabel} 1.724. Jadi, t_{hitung} 1.048121 < t_{tabel} 1.724 Artinya tidak ada hubungan linier antara jumlah uang beredar (X_4) dengan inflasi (Y). Jadi, dapat disimpulkan jumlah uang beredar memiliki pengaruh negatif akan tetapi tidak signifikan terhadap inflasi .

2. Uji Simultan (Uji f)

Secara keseluruhan, ketiga variabel suku bunga, nilai tukar, pengeluaran pemerintah dan jumlah uang beredar mempunyai nilai yang signifikan terhadap inflasi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F_{stat} sebesar 8.273 lebih besar daripada nilai F_{tabel} sebesar 3.06 pada tingkat keyakinan 95%.

3. Koefisien Determinan (R^2)

Hasil estimasi memiliki koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.688 atau 68.8%. Nilai ini memiliki arti bahwa variabilitas inflasi yang dapat dijelaskan dengan menggunakan variabel suku bunga, nilai tukar, pengeluaran pemerintah dan jumlah uang beredar sebesar 68.8% sedangkan sisanya sebesar 31.2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model ini.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku bunga mempunyai pengaruh yang positif terhadap inflasi. Artinya apabila suku bunga naik maka inflasi akan naik, *ceteris paribus*. Pengaruh tersebut tidak sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan negatif antara suku Bunga dengan inflasi akan tetapi signifikan secara statistik. Secara teori apabila suku bunga SBI naik maka akan

mendorong keinginan para pelaku ekonomi dan masyarakat untuk menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi yakni membeli surat berharga dari pada menggunakan uangnya untuk konsumsi, sehingga tidak akan menyebabkan inflasi. Hasil ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Primawan wisda Nugroho dan Maruto Umar Basuki (2012) yang menyatakan bahwa suku bunga SBI berpengaruh positif terhadap inflasi. Hal ini diduga bahwa penerbitan SBI dengan suku bunga yang terlalu tinggi malah dapat mendorong bank konvensional untuk menyimpan dananya dalam surat berharga yang diterbitkan oleh BI, sehingga alokasi kredit yang seharusnya mengalir ke sektor riil akan berkurang. Akibatnya hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif yang mungkin jauh lebih besar terhadap kondisi makro perekonomian ketimbang tingginya tingkat inflasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai tukar berpengaruh positif terhadap inflasi. Artinya, apabila nilai tukar naik maka inflasi akan naik *ceteris paribus*. Akan tetapi pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Hasil ini sesuai dengan teori yang menyatakan apabila harga mata uang dalam negeri naik akan menyebabkan kenaikan pada harga barang dan jasa karena Indonesia merupakan negara yang selalu mengimpor barang dan jasa dari luar negeri, sehingga ketika harga mata uang Indonesia turun atau terdepresiasi akan menyebabkan kenaikan inflasi. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Primawan wisda Nugroho dan Maruto Umar Basuki (2012) yang menyatakan bahwa nilai tukar berpengaruh positif tidak signifikan terhadap inflasi. Hal ini diperkirakan pada saat rupiah terdepresiasi terhadap dollar berdampak pada kenaikan harga barang, karena ada pergerakan mata uang antar dua negara bersumber dari tingkat harga masing-masing. Ketika harga-harga barang di luar negeri naik menyebabkan inflasi di Indonesia semakin tinggi. Hal ini dikarenakan barang-barang impor yang ada di Indonesia. Kenaikan harga didalam negeri terjadi karena dipengaruhi oleh kenaikan harga dari luar negeri, terutama barang-barang impor atau kenaikan bahan baku industri yang masih belum dapat diproduksi di dalam negeri. Atau dapat disebut dengan *imported inflation* yaitu inflasi yang terjadi di dalam negeri karena adanya pengaruh kenaikan harga dari luar negeri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap inflasi akan tetapi tidak signifikan secara statistik. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan negatif antara pengeluaran pemerintah terhadap inflasi. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2011) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap inflasi. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah uang beredar berpengaruh negatif terhadap inflasi akan tetapi tidak signifikan secara statistik. Artinya apabila jumlah uang beredar meningkat maka inflasi akan turun begitu pula sebaliknya *ceteris paribus*. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhesti Ningsih, LMS Kristiyanti (2018) yang menyatakan bahwa jumlah uang beredar berpengaruh negatif terhadap inflasi. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi di Indonesia dikarenakan jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar ditentukan oleh Bank Sentral dan jumlah uang yang diminta ditentukan oleh faktor seperti tingkat harga rata-rata dalam

perekonomian. Jumlah uang yang diminta masyarakat untuk melakukan transaksi bergantung pada tingkat harga barang dan jasa yang tersedia. Peningkatan harga kemudian akan mendorong naiknya jumlah uang yang diminta masyarakat (Perlambang, 2010). Kebijakan moneter yang dilakukan untuk menekan laju inflasi adalah salah satunya dengan mengurangi jumlah uang beredar atau penawaran uang misalnya dengan menaikkan suku bunga atau memperbesar cadangan wajib, dengan kebijakan ini diharapkan akan menimbulkan penurunan investasi dan menurunkan konsumsi dalam perekonomian masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku bunga SBI berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan negatif antara suku bunga dan inflasi.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai tukar pengaruh positif terhadap inflasi. Artinya, apabila nilai tukar naik maka inflasi akan naik *ceteris paribus*. Akan tetapi pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran mempunyai hubungan positif terhadap inflasi akan tetapi tidak signifikan secara statistik. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan negatif antara pengeluaran pemerintah terhadap inflasi.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah uang beredar berpengaruh negatif terhadap inflasi akan tetapi tidak signifikan secara statistik. Artinya apabila jumlah uang beredar meningkat maka inflasi akan turun begitu pula sebaliknya *ceteris paribus*.
5. Hasil penelitian suku bunga, nilai tukar, pengeluaran pemerintah dan jumlah uang beredar secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap inflasi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan maka berikut adalah saran yang dikemukakan:

Untuk menurunkan atau mempertahankan tingkat inflasi agar berada pada tingkat yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka sebaiknya bank Indonesia selaku pemegang otoritas tertinggi dalam kebijakan moneter, harus menjaga agar tingkat BI rate berada pada tingkat yang tepat sesuai dengan tingkat inflasi yang terjadi, agar jumlah uang beredar dimasyarakat tetap terjaga dan tidak menimbulkan inflasi. Pemerintah juga seharusnya menjaga atau mengusahakan pengeluarannya sesuai dengan apa yang telah dianggarkan agar tidak melebihi pendapatan pemerintah, karena apabila pengeluaran pemerintah seimbang dengan pendapatan pemerintah maka tingkat inflasi dapat dipertahankan. Selanjutnya memprioritaskan pengeluaran hanya pada bidang yang produktif sehingga diharapkan dapat meningkatkan kapaitas output yang dapat memenuhi kenaikan permintaan agregat akibat dari output tetap dan dapat menekan inflasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, sri dkk (1998). Perangkat analisis dan teknik analisis investasi pasar modal Indonesia. Jakarta
- Asfia Murni. (2016). Ekonomika Makro. PT Refika Aditama. Bandung.
- Boediono. (1994). Ekonomi Moneter Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi Moneter. Yogyakarta: LPBFE.
- Boediono, (2000), Ekonomi Internasional, BFFE, Yogyakarta
- Case, Karl E dan Ray C. Fair. 2001. Principles of Macroeconomics Paper
- Dumairy.1999. Perekonomian Indonesia. Yogyakarta : Erlangga
- Hubbard, R Glenn (1997). *Money The Financial System and The Economy*.
- Indriantoro N & Supomo B, (1999). Metodologi Penelitian Bisnis. Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Khalwaty, Tajul. (2000) Inflasi dan Solusinya, Jakarta: Salemba Empat
- Kern, David and Peter Gutmann (1992). *Interest rate analysis and forecasting*
- Lipsey, Richard G, Paul N. Courant and Christopher T.S Ragan. (1997). *Makroekonomics, Ninth Canadian Edition*. The Addison_Wesley Educational Publishers
- Nopirin. (2000). *Ekonomi Moneter. Buku I. Edisi ke 1*. Cetakan Kesepuluh. BPFE UGM. Yogyakarta.
- Nopirin. (1992). *Ekonomi Moneter Buku 2*. Yogyakarta : BPFE.
- Primawan Wirda Nugroho dan Maruto Umar Basuki. (2012). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia periode 2000.1-2011.4
- Pohan. Aulia. (2008). *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implikasinya di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Perlambang Heru (2010) Analisis Pengaruh Jumlah uang beredar, suku bunga SBI, nilai tukar terhadap tingkat inflasi". Univ Trisakti, Media Ekonomi Vol. 19 No 2, Agustus.
- Rahmawati (2011) Pengaruh jumlah uang beredar, pengeluaran pemerintah, suku bunga terhadap tingkat inflasi di Nagroaceh darusalam*
- Sunariyah. (2004). Pengantar Pengetahuan Pasar Modal. Edisi Pertama. UPP AMP YKPN. Yogyakarta
- Salvatore, (1997) Ekonomi Internasional, Jakarta Erlangga
- Suhesti Ningsih, LMS Kristiyanti (2018) nalisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga, Dan Nilai Tukar Terhadap Inflasi Di Indonesia Periode 2014-2016
- Sadono Sukirno. (2002). Teori Mikro Ekonomi. Cetakan Keempat Belas. Rajawali Press: Jakarta.